

Pengadaan Peta Administrasi Desa sebagai Upaya Meningkatkan Akses Informasi Wilayah bagi Masyarakat

Provision of a Village Administrative Map as an Effort to Improve Regional Information Access for the Community

Jaya Sakti Kurnia^{*1}, Nurhikma²,
Vira Ramadhani³, Nurfidah⁴, Andi Nur Ikhsan⁵, Muh.Rezki Wahyu⁶, Muh.Alfianza⁷

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: kkn78desamalewongposko7@gmail.com

ABSTRAK

Info Artikel	ABSTRAK
<i>Riwayat artikel</i> Dikirim: 16 Maret 2026 Direvisi: 5 April 2026 Diterima: 30 April 2026	Program kerja pengadaan peta administrasi desa merupakan salah satu bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan akses informasi wilayah bagi masyarakat desa. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Malewong pada tanggal 2 Mei 2026 melalui pembuatan peta administrasi yang memuat batas wilayah, pembagian dusun, serta informasi mengenai fasilitas umum yang terdapat di desa. Program ini dirancang sebagai media informasi yang tidak hanya informatif, tetapi juga mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga dapat membantu masyarakat maupun pendatang dalam mengenali kondisi geografis dan tata wilayah desa secara lebih jelas, sistematis, dan terstruktur. Pelaksanaan kegiatan melibatkan aparat desa dan masyarakat setempat dalam proses pengumpulan data hingga penyusunan peta. Metode yang digunakan yaitu pendekatan partisipatif dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam setiap tahapan kegiatan. Hasil pelaksanaan program menunjukkan bahwa keberadaan peta administrasi desa mampu memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi wilayah serta meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap batas dan potensi desa. Selain sebagai media informasi, peta administrasi desa juga berfungsi sebagai sarana pendukung dalam perencanaan pembangunan desa. Dengan adanya program ini, diharapkan masyarakat dapat lebih mengenal wilayahnya serta mendorong pengelolaan desa yang lebih terarah dan berkelanjutan.
<i>Kata Kunci:</i> Peta administrasi desa, Informasi wilayah, partisipasi masyarakat, pengabdian masyarakat	ABSTRACT <i>The implementation of this program involves village officials and local communities in the process of data collection up to the preparation of the village administrative map. This activity was carried out in Malewong Village on May 2, 2026, through the creation of an administrative map that includes territorial boundaries, hamlet divisions, and information on public facilities within the village. The method used is a participatory approach, which directly involves the community in every stage of the activity, starting from observation, area identification, to data validation. The results of the program indicate that the existence of a village administrative map can facilitate the community in accessing regional information and improve their understanding of territorial boundaries, hamlet divisions, and</i>

village potential. This program is also intended to support the availability of accurate and reliable village data that can be easily accessed by the community.

The existence of an administrative map provides a clearer overview of the village area, enabling the community to better recognize territorial boundaries and spatial organization. In addition, this activity contributes to increasing public awareness regarding the importance of understanding village administrative areas. Furthermore, the provision of a village administrative map serves not only as an information medium but also as a supporting tool for village development planning. Through this program, it is expected that the community can gain a better understanding of their environment and actively participate in managing village potential. Ultimately, this activity is expected to contribute to more organized, effective, and sustainable village governance.

© 20xx PPM LP2M, UIN Alauddin Makassar, Indonesia.

PENDAHULUAN

Peta administrasi desa merupakan salah satu media informasi yang memiliki peran penting dalam memberikan gambaran mengenai kondisi geografis serta batas wilayah suatu desa. Keberadaan peta administrasi tidak hanya berfungsi sebagai penunjuk lokasi, tetapi juga sebagai sarana untuk memahami pembagian wilayah, letak fasilitas umum, serta potensi yang dimiliki oleh desa. Selain itu, peta administrasi desa dapat menjadi alat yang efektif dalam mendukung penyebaran informasi kepada masyarakat secara lebih jelas, terarah, dan mudah dipahami. Menurut Aziz dan Rachman (1985), peta merupakan gambaran permukaan bumi yang diperkecil dengan skala tertentu dan digambarkan pada bidang datar melalui sistem proyeksi. Peta menyajikan objek dan fenomena keruangan menggunakan simbol sehingga informasi yang kompleks dapat dipahami secara cepat oleh pembacanya. Berdasarkan isinya, peta administrasi desa termasuk dalam kelompok peta tematik karena hanya menonjolkan tema tertentu, yaitu batas wilayah dan pembagian administratif.

Juhadi dan Setyowati (2001) menjelaskan bahwa penyusunan peta tematik menuntut kejelasan tema, ketepatan pemilihan simbol, serta keseimbangan komposisi agar informasi yang disampaikan tidak menimbulkan salah tafsir. Perkembangan teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG) turut memudahkan penyusunan peta desa. Menurut Prahasta (2009), melalui SIG data spasial berupa titik, garis, dan area dapat dipadukan dengan data atribut sehingga menghasilkan peta yang akurat sekaligus dapat diperbarui sewaktu-waktu. Prahasta (2011) menambahkan bahwa ketersediaan perangkat lunak pemetaan yang semakin mudah digunakan membuka peluang bagi desa untuk menyusun peta wilayahnya secara mandiri.

Di lingkungan pedesaan, ketersediaan informasi mengenai wilayah sering kali masih terbatas, sehingga masyarakat belum sepenuhnya memahami batas administratif, pembagian dusun, maupun potensi wilayah yang dimiliki. Kondisi tersebut dapat menyebabkan kurang optimalnya pemanfaatan sumber daya desa serta keterbatasan dalam mendukung perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan suatu media informasi yang mampu memberikan gambaran wilayah desa secara menyeluruh, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Secara yuridis, ketersediaan informasi wilayah desa memiliki dasar hukum yang kuat. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ditegaskan bahwa desa memiliki batas wilayah yang jelas sebagai bagian dari kewenangan mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya. Ketentuan teknis mengenai penetapan dan penegasan batas desa selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016. Selain itu, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial mengamanatkan bahwa informasi geospasial harus dapat dipertanggungjawabkan dan mudah diakses oleh masyarakat. Peta administrasi desa merupakan wujud paling sederhana dari amanat tersebut pada tingkat pemerintahan terkecil. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa yang tertib juga mensyaratkan tersedianya data wilayah yang lengkap sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016.

Desa Malewong merupakan salah satu desa yang memiliki potensi wilayah yang cukup besar, baik dari segi sumber daya alam maupun kondisi sosial masyarakatnya. Namun, belum tersedianya peta administrasi desa yang informatif dan mudah diakses oleh masyarakat menjadi salah satu kendala dalam memperoleh informasi wilayah secara jelas. Hal ini menyebabkan masyarakat masih mengalami kesulitan dalam memahami batas wilayah, pembagian dusun, serta letak fasilitas umum yang ada di desa.

Ketiadaan peta administrasi juga berdampak pada proses perencanaan pembangunan desa. Perencanaan yang tidak didukung data keruangan berisiko menghasilkan program yang tidak merata antardusun, karena pemerintah desa tidak memiliki gambaran utuh mengenai sebaran permukiman, lahan produktif, dan fasilitas umum. Adisasmita (2013) menegaskan bahwa pembangunan perdesaan yang efektif menuntut pendekatan partisipatif yang berangkat dari pengenalan wilayah oleh masyarakatnya sendiri.

Melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN), mahasiswa berupaya menghadirkan kegiatan yang dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Salah satu program kerja yang dilaksanakan yaitu pengadaan peta administrasi desa di Desa Malewong yang bertujuan untuk meningkatkan akses informasi wilayah bagi masyarakat. Program ini dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2026 sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada penyediaan media informasi berbasis peta.

Berdasarkan uraian tersebut, program pengadaan peta administrasi desa ini bertujuan untuk menyediakan media informasi wilayah yang akurat dan mudah dipahami oleh masyarakat Desa Malewong, meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap batas wilayah dan pembagian dusun, serta menyediakan dokumen pendukung bagi pemerintah desa dalam menyusun perencanaan pembangunan.

Dengan adanya peta administrasi desa, diharapkan masyarakat dapat lebih mengenal wilayahnya secara menyeluruh, meningkatkan pemahaman terhadap batas wilayah dan potensi desa, serta mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan desa. Selain itu, peta ini juga diharapkan dapat menjadi sarana informasi yang berkelanjutan dalam mendukung pengelolaan desa yang lebih terarah, efektif, dan berbasis data.

METODE PENELITIAN

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Malewong. Subjek dalam kegiatan ini yaitu masyarakat Desa Malewong, aparat desa, serta pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan peta administrasi desa.

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2026 dengan lokasi utama di Kantor Desa Malewong serta wilayah dusun yang menjadi objek pemetaan. Alat dan bahan yang digunakan meliputi perangkat komputer, perangkat lunak pengolah peta, telepon pintar yang dilengkapi penerima GPS untuk pencatatan titik koordinat, alat tulis, serta peta dasar wilayah yang diperoleh dari pemerintah desa dan kecamatan.

Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Pada tahap persiapan, mahasiswa KKN melakukan koordinasi dengan pemerintah desa terkait perencanaan kegiatan, pengumpulan data wilayah, serta penentuan informasi yang akan dimuat dalam peta administrasi desa. Selain itu, dilakukan observasi langsung ke lapangan untuk mengidentifikasi batas wilayah, pembagian dusun, serta letak fasilitas umum yang ada di desa.

Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara. Data primer diperoleh melalui pencatatan titik koordinat fasilitas umum seperti kantor desa, masjid, sekolah, dan sarana kesehatan, serta penelusuran batas dusun bersama aparat desa yang mengetahui riwayat batas wilayah. Data sekunder diperoleh dari dokumen profil desa, data monografi, dan peta dasar yang telah tersedia. Citra penginderaan jauh digunakan sebagai sumber data pelengkap karena, sebagaimana dijelaskan Sutanto (1986), citra mampu menyajikan gambaran permukaan bumi secara aktual sehingga membantu mengidentifikasi jaringan jalan dan sebaran permukiman.

Tahap pelaksanaan dilakukan dengan menyusun dan mengolah data yang telah diperoleh menjadi peta administrasi desa yang informatif dan mudah dipahami. Proses ini meliputi pengolahan data hasil observasi, penyusunan desain peta, hingga finalisasi peta yang siap digunakan sebagai media informasi. Dalam tahap ini, masyarakat juga dilibatkan untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan dalam peta sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

Penyusunan peta mengikuti kaidah kartografi dasar, yaitu pencantuman judul peta, skala, arah mata angin, legenda, sumber data, dan tahun pembuatan. Pemilihan warna dan simbol disesuaikan agar setiap dusun mudah dibedakan tanpa mengorbankan keterbacaan nama tempat. Draf peta yang telah disusun kemudian dicetak dalam ukuran besar untuk memudahkan proses pemeriksaan bersama.

Validasi dilakukan melalui pertemuan bersama aparat desa dan kepala dusun. Pada tahap ini setiap batas serta letak fasilitas umum diperiksa satu per satu, dan koreksi yang muncul langsung dicatat untuk diperbaiki pada draf berikutnya. Proses tersebut diulang hingga seluruh pihak menyepakati isi peta. Selanjutnya, tahap evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan program yang telah dilaksanakan. Evaluasi dilakukan dengan melihat sejauh mana peta administrasi desa dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, serta respon masyarakat terhadap keberadaan peta tersebut. Indikator keberhasilan kegiatan meliputi kemudahan akses informasi wilayah, tingkat pemahaman

masyarakat terhadap batas wilayah dan pembagian dusun, serta kebermanfaatan peta dalam mendukung kegiatan desa.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif berdasarkan hasil observasi lapangan, dokumentasi kegiatan, serta tanggapan masyarakat selama pelaksanaan program. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk menggambarkan efektivitas program dalam meningkatkan akses informasi wilayah melalui pengadaan peta administrasi desa di Desa Malewong.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program pengabdian masyarakat melalui kegiatan pengadaan peta administrasi desa dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2026 di Desa Malewong. Kegiatan ini diawali dengan tahap persiapan yang dilakukan oleh mahasiswa KKN bersama aparat desa dan masyarakat setempat. Pada tahap ini dilakukan koordinasi terkait pengumpulan data wilayah, identifikasi batas desa, pembagian dusun, serta penentuan informasi yang akan dimuat dalam peta administrasi desa.

Selanjutnya, tahap pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan proses pengolahan data hasil observasi lapangan menjadi peta administrasi desa yang informatif dan mudah dipahami. Proses ini meliputi penyusunan desain peta, penentuan simbol dan keterangan peta, serta penyesuaian data dengan kondisi nyata di lapangan. Dalam tahap ini, masyarakat dan aparat desa turut dilibatkan untuk memastikan keakuratan informasi yang disajikan dalam peta, sehingga hasil akhir sesuai dengan kondisi wilayah yang sebenarnya.

Peta administrasi Desa Malewong yang dihasilkan memuat beberapa komponen utama, yaitu batas administratif desa, batas antardusun, jaringan jalan, sebaran permukiman, serta letak fasilitas umum berupa kantor desa, sarana ibadah, sarana pendidikan, dan sarana kesehatan. Setiap komponen ditampilkan dengan simbol dan warna yang berbeda serta dijelaskan pada bagian legenda. Peta dicetak dalam ukuran besar dan dipasang di kantor desa agar dapat diakses oleh siapa pun yang berkunjung. Penempatan pada ruang publik dipilih karena peta yang hanya tersimpan dalam bentuk berkas digital cenderung tidak termanfaatkan oleh masyarakat umum.

Kegiatan pengadaan peta administrasi desa mendapatkan respon yang positif dari masyarakat. Hal ini terlihat dari antusiasme masyarakat dalam memberikan informasi terkait wilayah serta partisipasi dalam proses validasi data. Selain itu, masyarakat juga menunjukkan ketertarikan terhadap hasil peta yang telah dibuat karena dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai batas wilayah, pembagian dusun, dan letak fasilitas umum di desa.

Selain bermanfaat bagi warga desa sendiri, peta administrasi juga membantu pihak luar yang berkepentingan dengan wilayah desa, seperti petugas kesehatan, penyuluh pertanian, mahasiswa yang melaksanakan kegiatan lapangan, maupun pendatang yang baru pertama kali berkunjung. Menurut Juhadi dan Setyowati (2001), peta yang komposisinya tertata baik akan mempersingkat waktu yang dibutuhkan pembaca untuk mengenali suatu wilayah. Adapun hasil pelaksanaan kegiatan pengadaan peta administrasi desa di Desa Malewong dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Hasil Pelaksanaan Program Pengadaan Peta Administrasi Desa

No	Indikator Kegiatan	Hasil Pelaksanaan
1.	Partisipasi masyarakat	Masyarakat terlibat dalam pengumpulan dan validasi data wilayah
2.	Keakuratan data	Data peta sesuai dengan kondisi nyata di lapangan
3.	Pemahaman masyarakat	Masyarakat lebih memahami batas wilayah dan pembagian dusun
4.	Kelancaran kegiatan	Kegiatan berjalan dengan baik sesuai rencana
5.	Manfaat program	Peta dapat digunakan sebagai media informasi dan pendukung perencanaan desa

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pengadaan peta administrasi desa mampu meningkatkan akses informasi wilayah bagi masyarakat. Keberadaan peta ini memberikan kemudahan dalam memahami kondisi geografis desa serta membantu masyarakat dalam mengenali batas wilayah, pembagian dusun, dan potensi desa yang dimiliki. Dengan adanya informasi yang lebih jelas, masyarakat dapat lebih mudah dalam melakukan aktivitas yang berkaitan dengan wilayah desa.

Berdasarkan Tabel 1, seluruh indikator kegiatan menunjukkan hasil yang baik. Partisipasi masyarakat terlihat pada keterlibatan warga dalam pengumpulan dan validasi data, keakuratan data terjaga karena setiap informasi dicocokkan langsung dengan kondisi lapangan, dan kelancaran kegiatan tercapai karena seluruh tahapan berjalan sesuai rencana. Capaian tersebut menegaskan bahwa pendekatan partisipatif efektif diterapkan pada kegiatan pemetaan tingkat desa.

Selain itu, kegiatan ini juga memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya informasi wilayah yang akurat.

Masyarakat menjadi lebih peduli terhadap batas administratif desa serta lebih memahami pentingnya data dalam mendukung pembangunan desa. Hal ini menunjukkan bahwa peta administrasi desa tidak hanya berfungsi sebagai media informasi, tetapi juga sebagai sarana edukasi bagi masyarakat. Temuan dalam kegiatan ini menunjukkan bahwa pengadaan peta administrasi desa memiliki peran strategis dalam mendukung tata kelola desa yang lebih baik. Peta dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan, pengelolaan sumber daya, serta pengambilan keputusan oleh pemerintah desa. Dengan tersedianya data yang jelas dan terstruktur, proses perencanaan pembangunan desa dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Proses validasi bersama menjadi bagian yang paling banyak memunculkan diskusi. Beberapa segmen batas antardusun ternyata dipahami berbeda oleh warga di kedua sisi batas. Perbedaan tersebut diselesaikan melalui musyawarah yang difasilitasi aparat desa dengan merujuk pada dokumen dan kesepakatan yang pernah ada. Proses seperti ini menegaskan

bahwa penegasan batas desa bukan semata pekerjaan teknis, melainkan juga proses sosial yang memerlukan kesepakatan bersama.

Kendala yang dihadapi selama kegiatan antara lain terbatasnya dokumen batas wilayah yang terdokumentasi secara resmi, kondisi medan pada sebagian wilayah yang sulit dijangkau saat penelusuran titik koordinat, serta keterbatasan waktu pelaksanaan program. Kendala tersebut diatasi dengan mengandalkan keterangan tokoh masyarakat yang mengetahui riwayat batas, membagi tim menjadi kelompok kecil, serta memusatkan pemetaan pada objek yang paling dibutuhkan masyarakat.

Dari sisi keberlanjutan, pemerintah desa menyatakan kesediaan memperbarui peta secara berkala, terutama apabila terjadi penambahan fasilitas umum atau perubahan batas. Keberlanjutan tersebut membutuhkan penyimpanan berkas peta dalam bentuk digital di kantor desa, penunjukan perangkat desa yang bertanggung jawab atas pembaruan data, serta pendampingan teknis agar kualitas peta tetap terjaga.

Secara keseluruhan, pelaksanaan program pengadaan peta administrasi desa di Desa Malewong berhasil mencapai tujuan kegiatan, yaitu meningkatkan akses informasi wilayah serta membantu masyarakat dalam memahami kondisi wilayah desa secara lebih jelas, sistematis, dan terstruktur. Program ini juga memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pengelolaan desa yang lebih baik dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Pelaksanaan program pengadaan peta administrasi desa di Desa Malewong pada tanggal 2 Mei 2026 memberikan dampak positif terhadap peningkatan akses informasi wilayah bagi masyarakat. Program ini mampu menjadi media informasi yang efektif dalam membantu masyarakat memahami batas wilayah, pembagian dusun, serta letak fasilitas umum yang ada di desa secara lebih jelas dan terstruktur.

Kegiatan ini juga menunjukkan adanya partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pengumpulan dan validasi data, sehingga peta yang dihasilkan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Selain itu, keberadaan peta administrasi desa dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya informasi wilayah dalam kehidupan sehari-hari.

Secara keseluruhan, program pengadaan peta administrasi desa tidak hanya berfungsi sebagai penyedia informasi, tetapi juga sebagai sarana pendukung dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan desa yang lebih terarah. Oleh karena itu, program ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh pemerintah desa dan masyarakat, serta dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mendukung kemajuan desa di masa yang akan datang.

Berdasarkan hasil tersebut, disarankan agar pemerintah desa menyimpan berkas peta dalam bentuk digital dan memperbaruinya secara berkala, khususnya apabila terjadi penambahan fasilitas umum atau perubahan batas wilayah. Peta juga sebaiknya diperbanyak dan dipasang di setiap dusun agar jangkauan manfaatnya lebih luas. Ke depan, peta administrasi ini dapat dikembangkan menjadi peta tematik lain, misalnya peta potensi pertanian atau peta rawan bencana, sesuai kebutuhan pembangunan desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam pelaksanaan program pengabdian ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Pemerintah Desa Malewong, aparat desa, serta seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi dan mendukung terlaksananya kegiatan pengadaan peta administrasi desa.

Terima kasih juga disampaikan kepada dosen pembimbing lapangan yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Penghargaan yang sebesar-besarnya diberikan kepada seluruh mahasiswa KKN yang telah bekerja sama dalam menyelesaikan program kerja sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Semoga kegiatan ini dapat menjadi pengalaman yang bermanfaat serta memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan akses informasi wilayah dan mendukung pembangunan Desa Malewong ke arah yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2013). *Pembangunan Perdesaan: Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Aziz, T. L., & Rachman, R. (1985). *Peta Tematik*. Bandung: Jurusan Teknik Geodesi, Institut Teknologi Bandung.
- Juhadi, & Setyowati, D. L. (2001). *Desain dan Komposisi Peta Tematik*. Semarang: Cipta Prima Nusantara.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa.
- Prahasta, E. (2009). *Sistem Informasi Geografis: Konsep-Konsep Dasar (Perspektif Geodesi dan Geomatika)*. Bandung: Informatika.
- Prahasta, E. (2011). *Tutorial ArcGIS Desktop untuk Bidang Geodesi dan Geomatika*. Bandung: Informatika.
- Sutanto. (1986). *Penginderaan Jauh Jilid 1*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.